

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budiardjo, M. (2008). *Sistem politik Indonesia: Pemahaman secara teoritik dan empirik*. Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2000). *Research design: Qualitative and quantitative approaches*.
- Creswell, J. W. (2011). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Juwita, R. (2021). Amandemen Undang-Undang anti korupsi di Indonesia: Kontribusi terhadap pengembangan hukum anti korupsi internasional. Dalam *Asian Yearbook of International Law, Volume 25 (2019)* (pp. 130–153). Brill Nijhoff.
- Lusthaus, C., Adrien, M.-H., Anderson, G., Carden, F., & Montalván, G. P. (2002). *Organizational assessment: A framework for improving performance*. International Development Research Centre & Inter-American Development Bank.
- Maksudi, B. I. (2012). *Sistem politik Indonesia: Pemahaman secara teoretik dan empirik*.

Mochtar, Z. A. (2016). *Lembaga negara independen: Dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca amandemen konstitusi*. PT RajaGrafindo Persada.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*.

Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2005). *Metode penelitian kualitatif*. Rajawali Pers.

Mungiu-Pippidi, A. (2015b). *The quest for good governance: How societies develop control of corruption*. Cambridge University Press.

OECD. (2020). *OECD public integrity handbook*. OECD Publishing.

Sunarso, B. (2023). *Teori kepemimpinan*. CV Madani Berkah Abadi.

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Sugiyono, D. (2015). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Sugiyono, D. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Ubaedillah, A. (2016). *Pendidikan kewarganegaraan Pancasila, demokrasi dan pencegahan korupsi*. Prenada Media

Tugas Akhir:

Haikal, M. A. (2023). *Good governance: Transparansi pelaksanaan tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jurnal:

- Bayu, C. (2021). Transformasi kelembagaan KPK: UU KPK sebagai kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 84–97.
- Bovens, M. (2007). Menganalisis dan menilai akuntabilitas: Kerangka konseptual. *Jurnal Hukum Eropa*, 13(4), 447–468.
- Dwiono, S., Negara, E. S., & Ananda, A. R. (2023). The effect of political configuration on the implementation of tasks and authorities of the Corruption Eradication Commission (KPK) in Indonesia. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 2(3), 605–616.
- Elda, E. (2019). Arah kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia: Kajian pasca perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Lex Lata*, 1(2), 159.
- Fariz, D. (2019). Pemerintahan Joko Widodo dan serangan politik terhadap KPK. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 19–33.
- Firmansyah, R., & Harahap, C. B. (2025). Dinamika kepercayaan publik terhadap lembaga anti korupsi: Studi kasus dugaan pemerasan oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 359–365.
- Indriastuti, D., & Kurniawan, T. (2024). Strategi kebijakan pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 147–154.
- Kariem, M. Q. (2024). Transformasi Bawaslu dalam mewujudkan supremasi pemilihan umum. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(3), 252–258.
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). Gelombang kedua tata kelola era digital: Sebuah quasi-paradigma untuk pemerintahan di Web. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 371(1987).

- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4).
- Muharrir, M., & Adwani, A. (2017). Persepsi Camat Kabupaten Pidie terhadap kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia periode 2004–2009 dan 2009–2014: Suatu kajian pada upaya pemberantasan korupsi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(1).
- Mungiu-Pippidi, A. (2013). Controlling corruption through collective action. *Journal of Democracy*, 24(1), 101–115.
- Nayoan, S. J., & Mandey, J. C. (2011). Transformasi sebagai strategi desain. *Media Matrasain*, 8(2). <https://doi.org/10.35793/matrasain.v8i2.330>
- Prasetyo, R., & Santiago, F. (2025). Dinamika kinerja KPK pemberantasan korupsi pasca revisi UU KPK Tahun 2019. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2, 329–340.
- Putri, D. (2021). Korupsi dan perilaku koruptif. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 5(2).
- Randongkir, L. V., Zainal, V. R., & Hakim, A. (2025). Performance of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 6(4), 1120–1127.
- Rustandi, D., & Indriati, F. (2022). Analisis manajemen perubahan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca revisi undang-undang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 578–594.
- Saputra, M. A. (2020). Implementasi operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. *Lex Renaissance*, 5(4), 806–818.
- Sudiran, F. (2017). Mencegah korupsi di daerah dengan pengawasan oleh KEJATI. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1), 67–74.

Tauda, G. A., Huda, N. M., & Omara, A. (2023). Theoretical reconstruction of the existence of the Indonesian Corruption Eradication Commission and its comparison to other anti-corruption agencies in Asia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 172–193.

Telaumbanua, D. (2020). Restriktif status Dewan Pengawas KPK. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 258.

Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah ada? *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 239–258.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dokumen Lainnya:

Indonesia Corruption Watch. (2023). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023*. Indonesia Corruption Watch.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Laporan tahunan KPK 2018*.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Laporan tahunan KPK 2019*.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan akuntabilitas kinerja KPK 2023*.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Laporan tahunan KPK 2024*.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025*.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Laporan tahunan KPK 2025*.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD): Modul penatausahaan pengeluaran* (Versi 1.1). Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (n.d.). *Mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko* [Presentasi PowerPoint]. OSS Indonesia.

Marquette, H., & Peiffer, C. (2015). *Corruption and collective action*. Developmental Leadership Program, University of Birmingham.
<http://publications.dlprog.org/CorruptionandCollectiveAction.pdf>

Mungiu-Pippidi, A. (2015a). *Contemporary good-governance achievers* (ANTICORRP Policy Report No. 11). Hertie School of Governance.

Smidova, Z., Cavaciuti, A., & Johnson, J. (2022). *Anti-corruption and public integrity strategies: Insights from new OECD indicators* (OECD Economics Department Working Papers No. 1725).

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. (2022). *Digitalisasi untuk cegah korupsi*. Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi.

Tim Nasional Pencegahan Korupsi. (2024). *Laporan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan IV (B12) periode 2023–2024*.

Website:

Adrial Akbar. (2024, 13 Agustus). KPK terbitkan SP3 kasus Surya Darmadi usai PK Suheri Tetra dikabulkan MA. *Detiknews*.
<https://news.detik.com/berita/d-7488211/kpk-terbitkan-sp3-kasus-surya-darmadi-usai-pk-suheri-tetra-dikabulkan-ma>

Alamsyah, W., & Primayogha, E. (2021, 11 Mei). Polemik tes kebangsaan: Dewan pengawas harus memeriksa, menyidangkan, dan menjatuhkan hukuman berat kepada Ketua KPK! *Indonesia Corruption Watch*.

ANTARA. (2021). KPK pastikan proses penyidikan kasus benih lobster-bansos ikuti aturan hukum. *ANTARA News*.
<https://www.antaranews.com/berita/1994708/kpk-pastikan-proses-penyidikan-kasus-benur-bansos-ikuti-aturan-hukum>

Batubara, H. (2024, 22 November). Setyo Budiyo pernah jadi Dirdik, eks penyidik yakin bawa perubahan di KPK. *Detiknews*.
<https://news.detik.com/berita/d-7650911/setyo-budiyo-pernah-jadi-dirdik-eks-penyidik-yakin-bawa-perubahan-di-kpk>

Budiyo, S. (2025, 10 Juli). RDP dengan DPR, KPK paparkan capaian kinerja dan usulan tambahan anggaran. *Komisi Pemberantasan Korupsi*.

<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/rdp-dengan-dpr-kpk-paparkan-capaian-kinerja-dan-usulan-tambahan-anggaran>

Budianto, S. (2025, 11 Agustus). Kontribusi terhadap PNBPN, KPK setor Rp403 miliar ke kas negara selama semester I 2025. *Komisi Pemberantasan Korupsi*. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kontribusi-terhadap-pnbp-kpk-setor-rp403-miliar-ke-kas-negara-selama-semester-i-2025>

Feisal, R., & Kusbiantoro, D. (2025, 20 Juni). Kasus kuota haji, lima pejabat Kemenag diperiksa KPK. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/5114521/kasus-kuota-haji-lima-pejabat-kemenag-diperiksa-kpk>

Feisal, R., & Mano, D. H. (2025, 22 Juli). KPK akan minta keterangan pihak Google dalam penyelidikan Google Cloud. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/5006321/kpk-akan-minta-keterangan-pihak-google-dalam-penyelidikan-google-cloud/>

Gabriella, M., & ANTARA. (2024, 23 November). Mantan penyidik KPK soal pimpinan KPK baru: Tugas berat Setyo Budiyo lepas dari bayang-bayang kebobrokan Firli Bahuri. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/mantan-penyidik-kpk-soal-pimpinan-kpk-baru-tugas-berat-setyo-budiyo-lepas-dari-bayang-bayang-kebobrokan-firli-bahuri-1172340>

Indonesia Corruption Watch. (2022, 26 Oktober). *900 hari pencarian Harun Masiku: Bukti konkret kegagalan kepemimpinan Firli Bahuri*. Indonesia Corruption Watch.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2024). *Profil Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Setyo Budiyo*.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025, 12 Februari). *Penegakan hukum dan reformasi birokrasi masuk pada tiga*

fokus Stranas PK 2025–2026. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/penegakan-hukum-dan-reformasi-birokrasi-masuk-pada-tiga-fokus-stranas-pk-2025-2026>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Anti-Corruption Learning Center (ACLC).* <https://aclc.kpk.go.id/>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Profil pimpinan KPK 2024–2029: Setyo Budiyo.* <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/profil-pimpinan>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024, 28 November). *KPK dan KSP bersinergi susun rencana aksi Stranas PK 2025–2026.* <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-dan-ksp-bersinergi-susun-rencana-aksi-stranas-pk-2025-2026>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025, 30 April). *KPK tahan dua tersangka korupsi pengadaan lahan Jalan Tol Trans Sumatera TA 2018–2020.* <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tahan-dua-tersangka-korupsi-pengadaan-lahan-jalan-tol-trans-sumatera-ta-2018-2020>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025, 8 Desember). *Satukan aksi di Hakordia 2025, KPK dorong transformasi pendidikan integritas.* <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/satukan-aksi-di-hakordia-2025-kpk-dorong-transformasi-pendidikan-integritas>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *KPK gelar pelatihan property and evidence management bersama UNODC, FBI, dan US Marshals Service.* <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tingkatkan-kompetensi-pengelolaan-aset-dan-barang-bukti-lewat-pelatihan-unodc>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Platform Pembelajaran Antikorupsi Digital Terintegrasi (PRAKTISI).* <https://newlearning.kpk.go.id/>

- Lintang, I. (2025). *Profil Setyo Budiyo: Pendidikan, perjalanan karier, dan harta kekayaan. Inilah.com.* <https://www.inilah.com/setyo-budiyo>
- Rahmani, N. P. (2026, 28 Januari). KPK mulai memanfaatkan AI dalam pemeriksaan LHKPN pada 2025. *ANTARA News.* <https://www.antaranews.com/berita/5380954/kpk-mulai-manfaatkan-ai-dalam-pemeriksaan-lhkpn-pada-2025>
- Rizaldi, B. A. (2024, 21 November). Setyo Budiyo raih suara terbanyak untuk jadi Ketua KPK 2024–2029. *ANTARA News.* <https://www.antaranews.com/berita/4482089/setyo-budiyo-raih-suara-terbanyak-untuk-jadi-ketua-kpk-2024-2029>
- Sahara, W. (2021, 20 September). *Ini daftar kasus besar yang pernah ditangani Novel Baswedan.* *Kompas.com.* <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/30/18122941/ini-daftar-kasus-besar-yang-pernah-ditangani-novel-baswedan?page=all>
- Yandiwi Putra, A., & Abdurrahman, M. (2024, 26 Desember). Gebrakan awal Ketua KPK Setyo Budiyo, tetapkan Hastu sebagai tersangka. *Tempo.co.* <https://www.tempo.co/hukum/gebrakan-awal-ketua-kpk-setyo-budiyo-tetapkan-hastu-sebagai-tersangka-1186172>